PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MELALUI PENDIDIKAN KEJURUAN

Drs. Putu Sudira, MP.

Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

putupanji@uny.ac.id

1. **PENDAHULUAN**

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang dikembangkan untuk menyiapkan dan/atau meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia sebagai tenaga kerja terlatih memasuki dunia kerja yang menguntungkan bagi dirinya. Dimasa yang akan datang orientasi pengembangan pendidikan kejuruan akan diarahkan kepada program-program keahlian yang dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, pengalaman, wawasan, cara-cara berfikir kritis, kemampuan berkomunikasi efektif baik secara oral dan tertulis, berjiwa entrepreneurship, mampu mengakses dan menganalisis informasi, memiliki rasa ingin tahu dan mampu berimajinasi, serta memiliki jaringan yang dapat membantu diri siswa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Yang dicari dan dipilih oleh siswa pendidikan kejuruan adalah program keahlian yang memiliki prospek karir yang baik dan menguntungkan dimasa depan (Smith-Hughes :1917; Thompson: 1973; Gill, Dar, & Fluitman:2000; Dedi Supriadi:2002).

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk bekerja pada berbagai bidang pekerjaan dimana seseorang bisa mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan dan memberi kontribusi produktif kepada masyarakat dan dunia usaha dan industri yang membutuhkan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan skil, kecakapan, pemahaman, sikap (*attitude*), kebiasaan kerja, dan apresiasi yang dibutuhkan oleh pekerja untuk memasuki dunia kerja dan membuat *progress* atau kemajuan dalam pekerjaan yang penuh makna dan produktif. Dengan demikian pendidikan kejuruan memiliki ciri-ciri antara lain: (1) mengembangkan skil, kecakapan, sikap (*attitude*), apresiasi kerja, kebiasaan kerja, bermakna, dan produktif; (2) mempersiapkan seseorang untuk bekerja; (3) memberdayakan individu untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak; (4) berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan; (5) ada pengawasan dari masyarakat luas; dan (6) menguntungkan bagi diri siswa sebagai pekerja. Dengan demikian apresiasi terhadap jenis-jenis pekerjaan dan jabatan sangat penting bagi masyarakat pendidikan kejuruan. Kesadaran bahwa orang hidup butuh bekerja merupakan bagian pokok dari pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan menjadi tanpa makna jika masyarakat, penyelenggara, dan siswa kurang memiliki apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan, serta cara bekerja yang benar dan produktif sebagai kebiasaan (*habbit*) hidup. Pendidikan kejuruan harus mampu meletakkan cara-cara berfikir, berkata, dan bertindak berdasarkan kompetensi terpola sebagai kebiasaan yang kemudian menjadi karakter yang menguntungkan. Pendidikan kejuruan harus menyiapkan terbentuknya keterampilan/skil, kecakapan, perilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di masyarakat dan bersifat produktif.

Menurut Wardiman (1998: 32) pendidikan kejuruan dikembangkan melihat adanya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan. Pendidikan kejuruan melayani tujuan sistim ekonomi, wahana pengembangan SDM, peka terhadap dinamika kontemporer masyarakat. Dengan demikian pendidikan kejuruan juga harus adaptif terhadap perubahan-perubahan dan difusi teknologi, mempunyai kemanfaatan sosial yang luas. Sebagai pendidikan yang diturunkan dari kebutuhan ekonomi pendidikan kejuruan jelas lebih mengarah pada *education for earning a living.* Pendidikan kejuruan berfungsi sebagai penyesuai diri ”akulturasi” dan pembawa perubahan ”enkulturasi”. Pendidikan kejuruan mendorong adanya perubahan demi perbaikan dalam upaya penyesuaian diri dengan perubahan.

1. **PENDIDIKAN KEJURUAN**

Dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan dapat dibedakan dalam dua kelompok pendidikan, yaitu: (1) pendidikan akademik, dan (2) pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang bertujuan mempersiapkan peserta didik mengembangkan potensi akademik untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan profesional merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik meningkatkan potensi kompetensi sesuai bidang keahliannya. Pendidikan profesional ini termasuk dalam kategori penyelenggaan pendidikan yang berorientasi dunia kerja.

Dalam sistem penyelenggaraan pendidikan berorientasi dunia kerja di Indonesia, terdapat dua istilah pendidikan yang digunakan, yaitu: pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi. Dalam Pasal 15 Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, sedangkan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Dengan demikian, pendidikan kejuruan merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tingkat menengah, yaitu: pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada pendidikan tinggi, seperti: politeknik, program diploma, atau sejenisnya. Uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang terkait erat dengan ketenagakerjaan. Menurut Sapto Kuntoro sebagaimana dikutip Soeharsono (1989), hubungan antara jenjang pendidikan di sekolah dengan ketenagakerjaan dapat diilustrasikan seperti Gambar 1.

![E:\0-1 Proposal Disertasi Maret 2010\4-Proposal Disertasi Juli 2010 [Setelah Ujian]\Piramida Ketenagakerjaan.jpg]()

Gambar 1 Piramida Ketenagakerjaan dan Jenjang Pendidikan Sekolah

Daram rangka mendukung pengembangan SDM Pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya strategis dalam meningkatkan mutu, relevansi, dan akses SMK. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam melakukan inovasi dan pengembangan mutu dan relevansi pendidikan menengah kejuruan dimasa lalu telah dimulai jauh sebelum kemerdekaan. Indonesia telah beberapa kali mengembangkan model pendidikan kejuruan sejak satu setengah abad yang lalu.

Di Indonesia Pendidikan Teknik dan Kejuruan sebagai embrio pendidikan menengah kejuruan sudah ada jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Belanda dalam masa penjajahan pada tahun 1853 mendirikan sekolah kejuruan yang diberi nama *Ambachts School van Soerabaia* atau Sekolah Pertukangan Surabaya yang diperuntukkan bagi anak-anak Indo dan Belanda. Pada tahun 1856 sekolah serupa didirikan di Jakarta. Kedua sekolah ini diselenggarakan oleh swasta. *Ambachts School van Soerabaia* yang didirikan pada tahun 1853 adalah sekolah kejuruan pertama di Indonesia (Dedi Supriadi, 2002:7).

Selanjutnya sejak bergulirnya politik etika pada tahun 1901 Pemerintah Hindia Belanda membangun pendidikan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Bumiputera, bukan lagi semata-mata untuk kepentingan orang-orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Tiga Sekolah Pertukangan didirikan di Surabaya, Betawi dan Semarang dengan anggaran belanja Hindia Belanda pada tahun 1907. Dalam kutipan Dedi Supriadi (2002:9) dinyatakan bahwa lulusan Sekolah Pertukangan hanya dibekali kecakapan dasar kejuruan. Untuk meningkatkan kemampuan praktis memerlukan beberapa tahun bekerja di pabrik-pabrik industri dan di pekerjaan bangunan, sebelum mereka dapat melakukan usaha sendiri. Sekolah pertukangan merupakan sarana memajukan pertukangan bumiputera dalam bidang pertukangan kayu dan pertukangan besi. Meskipun sederhana model penyelenggaraan sekolah pertukangan sudah mengarah kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan.

Secara historis pendidikan kejuruan di Indonesia berakar pada zaman penjajahan Belanda. Menurut Oejeng Soewargama dikutip oleh Dedi Supriadi (2002: 11) pendidikan kejuruan yang berkembang di Indonesia adalah pendidikan kejuruan yang di Negeri Belanda disebut “*Beroesonder-wijs*” yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah oleh pemerintah. Untuk Indonesia pendidikan kejuruan yang lebih sesuai dengan kebutuhan Indonesia adalah “*Beroeps-en Vakopledingen*” yang di Jerman dinamakan “*Beroeps-und Fachschule*” dan di Inggris disebut “*Vocational Education*”. Pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi merupakan kelanjutan tradisi swasta yang tergabung dalam perhimpunan para pengusaha yang disebut dengan “*Bedrijfsgoepen*” (Belanda), “*Traders Union*” (Inggris), atau “*Wirihschajtgrupen*” (Jerman).

Pembabakan selajutnya pendidikan kejuruan di Indonesia dimulai dari kurun waktu 1950 yaitu pada masa orde lama. Arah pendidikan pada waktu itu cendrung mengarah kepada aktivitas politik praktis karena banyak partai politik yang berpengaruh. Kegiatan sivitas akademika dipengaruhi oleh pertentangan antar partai politik, mengarah pada masalah non akademis dan tujuan pendidikan nasional terabaikan. Pada masa orde lama pendidikan kejuruan belum memiliki fokus yang jelas sebagai pendidikan untuk kerja karena belum ada kurikulum pendidikan kejuruan.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Kurikulum 1964 yang sangat sarat dengan teori dimana bobot praktek kejuruan hanya 5% sampai dengan 20% dari seluruh program. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan berbasis *subject matter approach* bukan *competency based aproach* sehingga tamatan sekolah kejuruan lebih cenderung kepada pemilikan kemampuan ”pengetahuan” (*knowing*) bukan penguasaan kemampuan ”pengerjaan” (*doing*) (Wardiman, 1998: 7). Hal ini bertentangan dengan esensi pendidikan kejuruan yang seharusnya lebih menekankan aspek *doing* dari pada hanya *knowing.* Tujuan pendidikan kejuruan tidak jelas, ambivalen, dan tidak memberikan kemampuan memasuki dunia kerja. Menurut Wardiman (1998: 7) Kurikulum Tahun 1964 menggunakan metoda penyampaian pembelajaran komunikasi satu arah dimana guru berperilaku aktif dan peserta didik pasif. Pembelajaran cenderung bersifat abstrak, verbal, tektual, maya, artifisial. Sangat jarang menggunakan metoda belajar sambil bekerja seperti magang dan praktek di perusahaan. Kualifikasi tamatan tidak jelas kompetensinya dan tidak terkait dengan kualifikasi keahlian dunia kerja. Pembelajaran berpusat pada guru, fasilitas praktek kurang memadai, jumlah mutu guru tidak memadai. Keadaan ini menunjukkan konsep perencanaan dan pengembangan pendidikan kejuruan pada masa orde lama masih sangat lemah. Pendidikan kejuruan sebagai pendukung sistim ekonomi belum mendapat peran dan posisi karena pada masa orde lama perhatian pemerintah pada sektor ekonomi masih sangat lemah.

Pada masa orde baru pembangunan pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila, dan pembinaan sistim pendidikan nasional disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan, sehingga menghasilkan calon tenaga kerja yang diperlukan untuk pembangunan. Kebijakan mendasar terjadi pada tahun 1977, dimana sebagian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kejuruan dialih fungsikan menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan pertimbangan disamping usia lulusan SLTP baru 15 tahun, pendidikan kejuruan lebih efisien dilaksanakan pada tingkat menengah.

Kebijakan berikutnya adalah kebijakan ditetapkannya Kurikulum 1976 sebagai pengganti Kuruikulum 1964 (Wardiman, 1998: 10). Tujuan pendidikan kejuruan diarahkan untuk penyiapan peserta didik memasuki lapangan kerja saja (terminal). Akibatnya lulusan pendidikan kejuruan menjadi tidak pleksibel lalu menurunkan minat masyarakat mengambil jalur pendidikan kejuruan. Kualifikasi lulusan sekolah kejuruan tidak dikaitkan secara jelas dengan kompetensi atau tingkatan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Struktur Kurikulum 1976 memuat 20% program umum dan 80% program kejuruan terbagi menjadi (20% dasar kejuruan, 20% teori kejuruan, dan 40% praktek kejuruan). Ada perubahan yang sangat signifikan pada Kurikulum 1976 pada bidang praktek kejuruan dengan 40% praktek. Menggunakan sistim semester bersama pada kelas 1 sehingga sangat boros biaya dan bahan praktek (Wardiman, 1998: 11). Jenis dan bidang atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan mulai berkembang meliputi kelompok teknologi industri, teknologi pertanian, ekonomi dan perdagangan, teknologi kerumah tanggaan dan kejuruan kemasyarakatan.

Pembangunan pendidikan kejuruan pada Pelita II diarahkan pada penyelerasan atau penyesuaian kebutuhan berdasarkan piramida tenaga kerja Indonesia. Hanya sayang pendidikan menengah kejuruan kurang diminati terutama oleh masyarakat dari kalangan ekonomi menengah dan atas karena tujuan pendidikannya terminal. Akibatnya terbangun *image* SMK sebagai sekolah tukang dan sekolah kelas dua. Dampak ini membekas sampai sekarang sehingga Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) dibawah Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan program penciteraan lewat media cetak dan elektronik televisi. Banyak praktisi bisnis, artis, manajer dan entertainer yang dijadikan figur dalam iklan SMK dengan semboyan “SMK bisa”. Iklan SMK bisa cukup baik memberi penguatan citra SMK sehingga respon masyarakat terhadap SMK kembali meningkat tajam.

Pemisahan teori kejuruan dengan praktek kejuruan sebagai akibat pengaruh dari konsep taksonomi Bloom menyebabkan kurang sambungnya antara teori dengan praktek kejuruan (Wardiman 1998: 12). Kompetensi peserta didik yang seharusnya utuh yaitu bisa melakukan sesuatu didasari pengetahuan dan sikap tidak terbentuk dengan baik. Diperlukan penguatan dan keutuhan apa yang harus diketahui (*know*) dan apa yang harus dikerjakan (*do*) agar menjadi apa (*be*). Jumlah pelajaran matematika yang sangat sedikit menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir logis sehingga lulusan SMK menjadi tidak bisa berkembang atau kurang adaptif dengan perkembangan dan perubahan pekerjaan di tempat kerja. Akibatnya saat ini Direktorat PSMK mendorong penguatan dan peningkatan jumlah jam dan mutu pelaksanaan mata pelajaran matematika.

Pembangunan pendidikan kejuruan pada Pelita III menekankan konsolidasi dan aktualisasi peningkatan mutu, relevansi pendidikan kejuruan dan perluasan kesempatan pendidikan kejuruan melalui pembangunan SMK baru. Sistem pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan disegala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan. Akses pendidikan dan peningkatan mutu diperluas dan dipercepat untuk memenuhi kebutuhan SDM yang trampil, kreatif, inovatif. Realisasinya melalui program peningkatan daya tampung dengan penambahan rombongan belajar disetiap sekolah dan pembangunan SMK baru, sehingga jumlah murid menjadi dua kali lipat. Peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dilakukan melalui penyesuaian jumlah program studi, pengenalan pendidikan kewirausahaan, penyediaan informasi penempatan tenaga kerja bagi tamatan.

Kebijakan mendasar pada Pelita IV adalah adanya kampanye pendidikan kejuruan untuk menarik minat masyarakat terhadap pendidikan kejuruan. Kampanye ini berhasil baik tetapi sayang tidak diikuti konsolidasi mutu dan relevansi. Perubahan pendidikan kejuruan yang menonjol adalah adanya penyempurnaan Kurikulum 1976 menjadi Kurikulum SMK 1984 yang berkarakter: (1) tidak bersifat terminal, memberi peluang lulusannya untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT); (2) teori dan praktek kejuruan terintegrasi; (3) menekankan pada proses pendidikan; (4) ada program inti 60% dan program pilihan (40%). Program inti bersifat *common ground* harus diikuti oleh semua peserta didik, sedangkan program pilihan untuk peningkatan profesionalisme disesuaikan dengan bakat, minat, dan kebutuhan lingkungan, (5) porsi jam matematika masih juga kecil belum memenuhi kebutuhan minimal untuk pengembangan ilmu di PT.

Dalam Pelita IV pendidikan kejuruan telah mengupayakan peningkatan daya tampung/akses, peningkatan mutu dan relevansi. Kelemahannya ada pada konsolidasi akibat penambahan jumlah peserta didik sehingga kemampuan sekolah tidak sebanding dengan respon masyarakat yang mengikuti pendidikan di SMK. Belum ada pengembangan kerjasama antara SMK dengan industri. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan sepenuhnya dilaksanakan di sekolah sehingga wawasan lulusan terhadap industri tidak ada sama sekali. Model ini disebut ***supply driven*** dan ***school-based approach.***

Selanjutnya kebijakan pemerintah dalam pendidikan kejuruan dan keahlian termasuk politeknik terus diperluas dan ditingkatkan mutunya. Dikembangkan kerjasama antara dunia pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dunia industri (DU-DI). Kesenjangan antara lulusan SMK dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan di DU-DI menjadi perhatian Direktorat Dikmenjur. Diadakan penyesuaian jumlah, jenis, dan mutu lulusan SMK dengan kebutuhan industri. Pengembangan sekolah seutuhnya dilakukan dengan pembenahan Kurikulum SMK yang mengarah pada tiga komponen yaitu: (1) Pembentukan watak Indonesia secara normatif; (2) komponen keterampilan dasar; dan (3) komponen keterampilan produktif yang mengikuti kebutuhan pasar kerja dan dikelola secara pragmatik. Agar dapat mengikuti tuntutan pasar kerja sekolah SMK perlu memperhatikan penyelenggaraan pendidikan bersama institusi pasangan dan pendirian unit produksi di sekolah.

Diakhir Pelita V terjadi phenomena negatif dimana banyak DU-DI mempekerjakan tamatan SMA dan bukan SMK karena mutu tamatan SMK belum memenuhi kualifikasi. Ini diakibatkan oleh penyelenggaraan pendidikan di SMK tidak fokus pada kompetensi yang diperlukan di DU-DI. Program-program di SMK direncanakan, diorganisir, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sepihak oleh sekolah saja tanpa melibatkan institusi pasangan. Guru kurang memiliki pengalaman industri, perilaku budaya sekolah tidak sesuai dengan perilaku budaya kerja di industri. Orientasi program kurang memperhatikan trend perkembangan dan persaingan pasar.

Kebijakan pendidikan kejuruan pada GBHN 1993 menetapkan kualitas pendidikan perlu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan perkembangan pembangunan. Perlu terus dikembangkan kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dalam rangka pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan tenaga kerja yang cakap dan terampil. Wasasan *Link and Match* dikenalkan pada tahun 1993/1994. Sebagai wawasan pengembangan sumberdaya manusia, wawasan masa depan, wawasan mutu dan keunggulan, wawasan profesionalisme, wawasan nilai tambah, wawasan efisiensi (Wardiman, 1998: 20). Keberhasilan pendidikan di SMK diukur dengan *rate of return*. Keberhasilan pendidikan di SMK tidak cukup diukur dengan *social return*. Banyaknya tamatan SMK yang menganggur serta lamanya tamatan SMK mendapatkan pekerjaan atau bekerja sendiri diperhitungkan sebagai kegagalan (Wardiman, 1998: 20).

Kebijakan Pendidikan Kejuruan masa Orde Reformasi diletakkan pada pengembangan SMK menjelang 2020 dimana industri berperan aktif dalam pengembangan standar kompetensi, penyusunan bahan ajar, pengujian dan sertifikasi. Sertifikasi dilaksanakan berdasarkan keterampilan berbasis kompetensi. Peningkatan mutu SMK, dan peningkatan kinerja melalui penerapan TQM dan ISO 9001.

Pada tahun 2004 ada kebijakan pergantian Kurikulum SMK 1999 dengan Kurikulum berbasis kompetensi Kurikulum SMK 2004. Setelah keluar Permendiknas No. 22, 23, 24; BSNP mengeluarkan pedoman penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dikenal dengan KTSP yang mulai digunakan pada tahun 2007. KTSP adalah kurikulum berdiversifikasi sesuai kebutuhan daerah dan satuan pendidikan. Kurikulum ini lebih memberi peluang teradopsinya kebutuhan daerah. Daerah dapat mengembangkan kurikulum pendidikan SMK yang lebih fokus kepada kebutuhan pengembangan SDM daerahnya. Perubahan pengelolaan kurikulum pendidikan SMK dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik masih banyak kendala. Kesempatan pengelolaan secara desentralistik belum ditangkap sebagai peluang perbaikan pendidikan SMK. Justru sebaliknya masih menjadi hambatan. Hambatannya terletak pada kesiapan tingkat satuan pendidikan SMK untuk mengembangkan kurikulum.

Sejak diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 diganti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara hukum pendidikan di Indonesia sudah harus diselenggarakan secara desentralistik. Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pendidikan untuk pemerataan, kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan secara otonom. Otonomi pendidikan meletakkan tantangan kepada pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal (UU Sisdiknas Pasal 50 ayat 5). Pemerintah kabupaten/kota melakukan peningkatan secara berencana dan berkala untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antar bangsa dalam peradaban dunia (penjelasan Pasal 35 ayat 1). Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal (penjelasan PP 19 Pasal 91 ayat 1).

1. **PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENDIDIKAN KEJURUAN**

Wawasan pengembangan SDM dalam frame kebijakan link and match berencana dan berusaha menempatkan pendidikan kejuruan sebagai sub-sistem pembangunan nasional. Pengembangan SDm menuntut penyelenggaraan pendidikan di SMK tidak sebatas proses persekolahan sebagai layanan sosial pemenuhan kebutuhan akses pendidikan dan kewajiban belajar bagi masyarakat, tetapi lebih kepada kesungguhan untuk meningkatkan kualitas lulusan yang mampu bersaing memperebutkan pasar tenaga kerja dan bersifat produktif. Masih sejalan dengan pemikiran Wardiman (1998), SMK harus dapat diprogramkan untuk menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi penguasaan IPTEK, produktif, sebagai aset bangsa berpenghasilan sendiri, unggul dalam kompetisi menghadapi persaingan global, berkembang secara berkelanjutan. Secara terus menerus SMK harus mengukur kualitas pendidikannya menggunakan ukuran atau standar dunia kerja, cara kerja sesuai persyaratan teknis dunia kerja. Dengan demikian diklat di SMK membutuhkan pengujian oleh pihak dunia kerja dalam bentuk uji kompetensi. Pendek kata SMK harus berkemampuan sebagai pusat pengembangan budaya industri.

*Link and Match* sebagai dasar pembaharuan pendidikan kejuruan dilaksanakan dengan *dual-based program*, pendewasaan manajemen sekolah, pengembangan unit produksi. Terjadi penataan dan pembaharuan dimensi-dimensi pendidikan kejuruan dari: (1) “*Supply Driven* ke *Demand Driven*; (2) pendidikan berbasis sekolah (*school based*) menjadi pendidikan berbasis ganda (*dual based*); (3) pengajaran berbasis mata pelajaran (*subject matter*) menjadi pengajaran berbasis kompetensi (*competencies based*); (4) program dasar yang sempit (*narrow based*) ke program dasar yang mendasar (*broad based*); (5) pendidikan formal yang kaku menjadi pendidikan formal yang luwes (*multi entry-multi exit*); (6) tidak mengakui keahlian dari luar sekolah menjadi mengakui kompetensi yang diperoleh dari manapun dan dengan cara apapun (*recognition of prior learning=RPL*); (7) pemisahan yang tegas antara pendidikan dan latihan menjadi pengintegrasian pendidikan dan latihan; (8) pendidikan bersifat terminal (*dead end*) menjadi pendidikan berkelanjutan (*bridging program*); (9) manajemen terpusat (sentralistik) menjadi manajemen mandiri (desentralistik).

Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) belum sepenuhnya menghasilkan pembaharuan wawasan pengelolaan pendidikan kejuruan melalui pembentukan lembaga pendukung PSG, penyusunan perangkat lunak, peningkatan kesempatan kerja di industri, peningkatan mutu dan pengakuan di masyarakat melalui uji sertifikasi, peningkatan animo masyarakat, penataan pengembangan manajemen, prakerin bagi guru SMK, pelaksanaan unit produksi, pemasyarakatan PSG, gebyar SMK belum berjalan lancar. Reposisi pendidikan kejuruan selanjutnya ditujukan untuk menata ulang (*re-engineering*) sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan yang *permeable* dan fleksibel dengan menerapkan pola pembelajaran berbasis kompetensi (*competency based training/CBT*) sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kualitas SDM wilayah/daerah. *Re-engineering* pada akhirnya diharapkan SMK berkembang menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPPKT) (Gatot Hari Priowirjanto, 2001: 4).

1. **KESIMPULAN**

Dengan memperhatikan dimensi pembaharuan pendidikan kejuruan dalam kerangka pengembangan SDM maka perencanaan pembangunan pendidikan kejuruan harus melibatkan pihak dunia kerja agar pembangunan SMK dengan berbagai jenis program, bidang, dan kompetensi keahlian betul-betul sesuai atau relevan dengan kebutuhan. Penyusunan kurikulum sebagai basis program pendidikan juga harus melibatkan dunia kerja karena dunia kerjalah yang lebih tahu kebutuhan kompetensi tamatan. Pendidikan di SMK sejak awal harus memberikan pengalaman belajar pembentukan wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawsan pasar, wawasan nilai tambah, dan pembentukan etos kerja melalui *learning by doing* bukan atas teori di kelas.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dedi Supriadi, (2002). *Satu Setengah Abad Pendidikan Kejuruan di Indonesia*  dalam Dedi Supriadi, *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan Di Indonesia.* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah

## **Fahruddin Salim. (2009).** Ekonomi Kreatif Mampu Bertahan dari Krisis. Diambil dari: http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/opini/ 1id104627.html

Finch & Crunkilton. (1999). *Curriculum Development in Vocational and Technical Education, Planning, Content, and Implementation.* United State of America : Allyn & Bacon A Viacom Company.

Finlay, Niven,& Young. 1998. *Changing Vocational Education and Training an International Comparative Perspective .* London: Routledge.

Gill, I.S.,Fluitman.F.,& Dar.A. (2000). *Vocational Education and Training Reform, Matching Skills to Markets and Budgets.*Washington: Oxford University Press.

Pavlova, M. (2009). *Technology and vocational education for sustainable development: Empowering individuals for the future*. Australia: Springer.

Power, C.N. (1999). Technical dan vocational education for the twenty-first century. *Prospects Journal*, Vol. xxix, No. 1, 29-36.

Slamet,P.H. (2008). *Desentralisasi Pendidikan Indonesia.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Smith, E. (2009). *Teacher, Instructors and Trainers: An Australian Focus.* Maclean, R., Wilson, D. International Handbokof Education forthe Changing World of Work brdidging Academic and Vocating Learning.Germany: UESCO-UNEVOC

Soeharsono Sagir. (1989). *Membangun manusia karya, masalah ketenagakerjaan dan pengembangan sumberdaya manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Thompson, John F, 1973. *Foundation of Vocational Education Social and Philosophical Concepts.*Prentice-Hall, New Jersey

Wagner, T. (2008). *The global achievement gap*. New York: Basic Books.

Wardiman Djojonegoro. 1998. *Pengembangan Sumberdaya Manusia melalui SMK.* Jakarta : PT. Jayakarta Agung Offset.

Workkeys. (2003). *Workkeys and Dacum: Working Together*. Iowa: WWW.Act.Org/Workkeys and WWW.Cnm.Edu-Workkeys\_Dacum.Pdf.